

## **SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI SLB B-F MANDARA KOTA KENDARI TAHUN 2021**

<sup>1</sup>Muh. Najib Husain, <sup>2</sup>Dian Trianita Lestari, <sup>3</sup>Iriyani Astuti Arief

<sup>1</sup>Ilmu Politik <sup>23</sup>Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

Email: [muh.najib.husain@gmail.com](mailto:muh.najib.husain@gmail.com), [dian.trianita@uho.ac.id](mailto:dian.trianita@uho.ac.id), [riyanirief@gmail.com](mailto:riyanirief@gmail.com)

### **RINGKASAN**

Program Pengabdian kepada Masyarakat berjudul: Sosialisasi Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas di SLB B-F Mandara Kota Kendari Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa penyandang disabilitas atas hak politiknya sehingga dapat meningkatkan partisipasi politiknya dalam pemilu. Untuk itu, tim pengabdian melakukan sosialisasi berbentuk pengenalan pendidikan politik kepada peserta secara langsung. Hal ini dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, dikhawatirkan tingkat partisipasi politik para penyandang disabilitas akan semakin menurun. Melalui metode sosialisasi ini, tim pengabdian melakukan transfer ilmu dan nilai ke siswa dengan bantuan media seperti poster dan materi dalam bentuk power point. Dalam kegiatan pengabdian ini, tim bekerja sama dengan mitra yaitu SLB B-F Mandara Kota Kendari dan KPU Kota Kendari. Dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung ke rumah-rumah siswa, keseluruhan siswa-siswi dan orangtuanya mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pengenalan tentang pendidikan politik kepada mereka, baik itu yang dilakukan secara langsung mendatangi rumah mereka ataupun di sekolah atau tempat publik lainnya. Oleh karena itu, tim pengabdian memberikan rekomendasi kepada Pihak KPU Kota Kendari, hendaknya membuat sebuah Program khusus yang berkesinambungan bagi siswa-siswi penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan SLB-SLB di Kota Kendari. Sehingga mereka bersedia dengan sukarela memberikan suaranya dalam pemilu tanpa harus malu dan takut berada di TPS.

**Kata Kunci:** Pendidikan Politik, Disabilitas, SLB B-F Mandara

### **A. Analisis Situasi**

Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang spesifik, khususnya dalam sistem Demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan Pemilu secara teratur, baik itu dalam Pemilihan Umum Presiden, Gubernur, Bupati, Anggota Legislatif. Ada beberapa syarat agar sebuah Negara dapat dikatakan sebagai Negara demokratis. Pakar demokrasi George Sorensen mengungkapkan bahwa, iklim demokrasi yang sehat akan terwujud apabila didalmnya terdapat jaminan bagi

warga negaranya dalam menjalankan kehidupan politiknya. Jaminan tersebut terdiri dari 8 bagian ; *Pertama*, Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi. *Kedua*, Kebebasan mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, Hak memilih yang tidak pandang bentuk tubuh. *Keempat*, Kesempatan menjadi pejabat Pemerintah. *Kelima*, Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing mencari dukungan. *Keenam*, Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara. *Ketujuh*, Hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternative. *Kedelapan*, Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.

Dalam pelaksanaan sistem demokrasi memiliki nilai yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, karena jika nilai tersebut dilanggar baik oleh pemerintahnya maupun sekelompok orang tertentu, maka sistem demokrasi yang dijalankan bisa dinyatakan cacat. Nilai tersebut adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Demokrasi dan HAM bersumber dari gagasan fundamental yang sama, yakni semua manusia memiliki martabat yang sama. Sehingga Demokrasi dan HAM harus jalan saling beriringan, jika terjadi kemerosotan demokrasi akan mengakibatkan kemerosotan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia pula.

Hak Asasi Manusia (HAM) telah melekat pada manusia sejak lahir di dunia, dan tidak ada seorangpun dapat merubah atau menggantikannya. Dengan adanya HAM disini seharusnya dapat membantu orang-orang yang terlahir kurang sempurna (Disabilitas), agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan manusia normal lainnya, salah satunya dalam kehidupan berdemokrasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada 8 jaminan yang harus dimiliki warga Negara , apabila ingin dinyatakan sebagai Negara dengan iklim demokrasi yang sehat. Jaminan tersebut harus terpenuhi beberapa Hak-haknya seperti ; Hak-hak Liberal, Hak-hak Politik, Hak-hak Sosial dan Ekonomi , serta Hak-hak Budaya. Semua warga Negara harus bisa merasakan Hak-hak tersebut tanpa adanya perbedaaan dari kondisi tubuh. Seperti orang-orang Disabilitas, seharusnya bisa mendapatkan hak-hak politiknya secara sempurna, sama seperti hak-hak politik yang didapatkan oleh orang

normal lainnya. Hak-hak politik disini mencakup hak warga Negara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan dan pengawasan kekuasaan politik. Persamaan hak yang dimaksud disini adalah persamaan hak dalam Pemilu, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan informasi, perlindungan dari penindaasan oleh Negara, serta hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Melihat pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta pentingnya persamaan Hak Asasi Manusia kelompok disabilitas, maka Negara Indonesia mengeluarkan beberapa aturan seperti Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, namun dalam pelaksanaan aturan ini masih belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok disabilitas. Fenomena terhadap Disabilitas permasalahan cukup rumit, dimana seharusnya orang-orang disabilitas ini memiliki kesempatan yang sama dengan orang normal lainnya terkait dengan hak pilih mereka, dan bahkan bis amenjadi bagian dalam pengurus partai. Namun pada kenyataannya, hak-hak politik kaum disabilitas ini masih sering terabaikan baik secara pasif dan aktif.

Kota Kendari merupakan salah satu kota dengan penyandang Disabilitas yang banyak. Berdasarkan hasil DPT (Daftar Pemilih Tetap) hingga saat ini tercatat 347 wajib pilih penyandang disabilitas yang tersebar di 10 Kecamatan di Kota Kendari. Dari jumlah penyandang disabilitas itu, terbanyak dari tunanetra yakni ada 84 orang, dan yang terendah adalah yakni 41 orang. Sementara Tunarungu/Wicara ada 83 orang, sedangkan tunadaksa ada 75 orang, dan disabilitas lainnya ada 64 orang. Penyandang tunanetra yang terbanyak berada di Kecamatan Kendari, kemudian menyusul Kecamatan Mandonga, Kendari Barat, Poasia, Wua-wua, Kadia, Baruga, Kambu, Puuwatu dan Abeli.

Melihat banyaknya penyandang disabilitas tersebar di Kota Kendari, tentunya diperlukan perlakuan khusus agar mereka mengetahui hak-hak politik yang seharusnya didapatkan dalam pemilihan umum, baik itu tingkat pusat maupun daerah. Karena jika tidak diberikan pengenalan secara mendalam mengenai pendidikan politik, bisa saja mereka mengabaikan dan tidak memilih pada saat Pemilu. Selain itu, pengenalan

pendidikan politik bagi kaum disabilitas dianggap penting, agar mereka tidak merasa diperlakukan berbeda dengan orang-orang normal lainnya. Kelompok disabilitas memiliki keterbatasan baik pada penglihatan, pendengaran, berbicara, maupun keterbatasan lainnya (Cacat tangan atau kaki). Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak diperhatikan hak-hak politiknya, karena dianggap menyusahkan, sehingga mereka memilih untuk tidak memilih. Apalagi jika tidak ada pendampingan dari pihak-pihak tertentu dalam menyampaikan suaranya di bilik pengambilan suara.

Penyandang disabilitas di Kota Kendari tersebar dengan berbagai macam bentuk Komunitas, Perkumpulan, maupun Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satunya adalah SLB B-F Mandara yang terletak di Kota Kendari yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan. Mulai dari TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). SLB B-F Mandara ini memiliki siswa yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dalam Pemilu, atau biasa dikenal dengan istilah Pemilih Pemula.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

### **1. Tempat dan Waktu**

Rangkaian kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara *door to door* dengan mengunjungi langsung obyek pengabdian di rumahnya masing-masing selama dua hari yakni pada tanggal 18 dan 20 September 2021. Hasil sosialisasi kemudian dilakukan diseminasi bertempat di kantor KPU Kota Kendari pada tanggal 28 September 2021.

### **2. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswi SLB B-F Mandara Kota Kendari yang terdiri dari disabilitas tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita dan autis. adapun yang menjadi mitra ialah SLB B-F Mandara Kota Kendari dan KPU Kota Kendari.

### **3. Realisasi Pemecahan Masalah**

Realisasi pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh obyek pengabdian ialah dengan melakukan sosialisasi/pengenalan pendidikan politik bagi kelompok disabilitas. Dalam sosialisasi ini dijelaskan mengenai pentingnya hak-hak politik dari kelompok

disabilitas, agar meminimalisir jumlah ketidakhadiran mereka dalam pemilu. Melalui sosialisasi ini, kami dari civitas akademika Program Studi Ilmu Politik Universitas Halu Oleo bekerja sama dengan KPU Kota Kendari, akan memberikan petunjuk-petunjuk serta pendampingan bagi para kelompok disabilitas pada saat memberikan suaranya di bilik suara. Hal ini dilakukan agar para pemilih pemula dari kaum disabilitas Kota Kendari, mampu memberikan suaranya tanpa adanya perbedaan-perbedaan dengan orang normal lainnya. Jika KPU Kota Kendari mampu memberikan pendampingan yang baik serta pemahaman akan pentingnya pendidikan politik bagi kelompok disabilitas di Kota Kendari, maka tingkat partisipasi kaum disabilitas akan naik dan mampu mewujudkan iklim demokrasi yang sehat.

#### **4. Indikator Keberhasilan**

- a. Tercapainya tujuan kegiatan pengabdian;
- b. Tercapainya target materi yang direncanakan untuk dipaparkan;
- c. Umpan balik dari siswa/i sebagai obyek pengabdian;
- d. Meningkatnya jumlah partisipasi politik disabilitas di kota Kendari pada pemilu tahun 2024.

#### **5. Metode Evaluasi**

Adapun langkah evaluasi pelaksanaan program setelah kegiatan pengabdian dilakukan melalui identifikasi faktor pendukung dan penghambat kegiatan. Hal ini diperlukan agar ketika program ini akan dilaksanakan kembali, baik di lokasi yang sama maupun lokasi yang lainnya, akan meminimalisir kekurangan pada kegiatan. Di satu sisi, keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan, dilakukan dengan mekanisme kontrol berdasarkan hasil dari Pemilu, yaitu ada atau tidaknya peningkatan jumlah pemilih dari kelompok disabilitas yang menyalurkan hak suaranya pada pilkada, pileg, pilpres di masa akan datang. Jika belum terdapat peningkatan, maka diperlukan program selanjutnya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dosen dalam memenuhi Tridharma Perguruan tinggi. Program pengabdian ini berfokus pada pemberian sosialisasi pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, khususnya siswa-siswi disabilitas di SLB B-F Mandara Kota Kendari. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung mendatangi rumah-rumah siswa (*door to door*). Hal ini dilakukan karena kondisi saat ini yang sedang diterapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), tidak memungkinkan untuk mengumpulkan siswa-siswi didalam satu ruangan untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, kondisi siswa-siswi penyandang disabilitas ini berbeda dengan siswa-siswi normal lainnya, mereka harus diberikan sosialisasi melalui pendekatan khusus. Tujuan utama dilakukan sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan pendidikan politik bagi Pemilih pemula dari penyandang disabilitas, sehingga pada pemilu tahun 2024 mereka sudah bisa ikut memilih. Selain itu, untuk menyampaikan hak-hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas pada saat Pemilu, tanpa adanya diskriminasi sedikitpun dari pemilih normal lainnya, serta pengenalan syarat-syarat wajib yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas sebelum mengikuti pesta demokrasi.

Adapun siswa-siswa yang menjadi sasaran tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam melakukan sosialisasi, terdiri dari Tunarungu, Tunanetra, Tunagrahita ringan, Tunadaksa ringan, dan Autis, keseluruhan siswa-siswi ini berusia antara 14-15 Tahun. Selain siswa-siswi, Orangtua/Wali murid dan guru-guru penyandang disabilitas juga menjadi sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini. Hal ini bertujuan agar orangtua/Wali dari siswa-siswi penyandang disabilitas ini, bisa mendampingi dan menuntun mereka pada saat pelaksanaan Pemilu, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya suara mereka dalam Pemilu. Untuk memudahkan tim PKM melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas ini, tim PKM membuat flyer/brosur berisikan pengenalan pendidikan politik (Syarat-syarat pemilih), dan hak-hak yang wajib didapatkan oleh penyandang Disabilitas sesuai kebutuhan mereka. Misalnya siswa-siswi

tunanetra dibuatkan flyer dalam bentuk huruf braile, sedangkan siswa-siswi Tunarungu, Tunagrahita ringan, Tunadaksa ringan, dan Autis dibuatkan flyer dengan tulisan yang jelas disertai dengan gambar-gambar berwarna dan menarik.

Sebelum melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa (*door to door*), Tim PKM berkoordinasi dan meminta izin dengan pihak SLB B-F Mandara. Setelah itu, Tim PKM mendapatkan data-data dari siswa-siswi disertai dengan Surat Pengantar dari pihak sekolah untuk melaksanakan Sosialisasi pengenalan pendidikan politik tersebut. Dari lima belas (15) data siswa yang diberikan dari pihak sekolah, hanya 7 rumah siswa yang bisa dikunjungi oleh tim PKM. Hal ini terjadi karena ada beberapa orangtua siswa yang menolak kunjungan langsung dari kami setelah dilakukan konfirmasi via telepon sebelumnya. Selain itu, ada beberapa siswa yang sedang sakit dan tidak bisa dikunjungi, serta ada beberapa siswa juga yang sedang berada di kampung (Bau-bau). Ketujuh rumah siswa-siswi yang dikunjungi oleh Tim PKM terdiri dari 2 orang penyandang Tunarungu, 2 orang Penyandang Tunanetra, 1 orang penyandang Tunagrahita ringan, 1 orang penyandang Tunadaksa ringan, dan 1 orang Autis.

Sosialisasi pendidikan politik bagi penyandang disabilitas ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Tim PKM, siswa-siswi disabilitas, serta orangtua/Wali dari siswa-siswi penyandang disabilitas. Pada saat Tim PKM mengunjungi siswa Tunarungu (Andini dan Nur Rahmaniar) awalnya terkendala, karena anggota tim tidak mengetahui bahasa Isyarat khusus untuk tunarungu, sehingga siswa tersebut tidak mendengar dan kurang mengerti apa yang disampaikan oleh tim. Namun setelah Tim PKM memberikan flyer yang telah dibuat, barulah mereka mulai tertarik karena gambar-gambar dan tulisan dalam flyer tersebut cukup menarik, serta memuat semua pesan-pesan tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula khususnya penyandang disabilitas. Kendala bagi siswa-siswi tunarungu adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat khusus untuk mereka. Sehingga mereka belum memahami sepenuhnya apa itu Pemilu dan bagaimana cara memilih pada saat Pemilu tiba. Selain itu, Orangtua/Wali murid dari siswa-siswi tunarungu ini mengakui bahwa belum pernah

adanya sosialisasi langsung ke rumah dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak politik bagi penyandang disabilitas khususnya tunarungu.

Adapun kunjungan pada penyandang tunanetra, dilakukan kepada dua siswa atas nama Muh. Adriansyah Sadaoda dan Nurjannah. Pada saat tim mengunjungi rumahnya, Muh. Adriansyah tidak begitu respon, bahkan terkesan cuek tidak memperhatikan apa yang tim kami sampaikan. Tim menjelaskan tujuan kedatangan ini adalah untuk memberikan sosialisasi mengenai pendidikan politik bagi pemilih pemula seperti mereka (tunanetra), sehingga pada tahun 2024 mereka bisa memilih dalam Pemilu yang akan diadakan serentak. Penjelasan mengenai Pemilu, mengundang perhatian dari Muh. Adriansyah sehingga dia semangat bertanya apa itu Pemilu dan siapa saja yang dipilih dalam Pemilu. Melihat antusias dari Adriansyah, Tim PKM mulai memberikan flyer dalam huruf Braile yang telah dibuat oleh Tim, agar siswa tersebut bisa membaca sendiri isi pesan-pesan politik yang terkandung didalamnya. Kondisi yang terjadi pada siswa Muh. Adriansyah ini menunjukkan bahwa, penyandang tunanetra ini tidak pernah diberikan pengenalan bahkan pemahaman dasar mengenai pendidikan politik, karena istilah pemilu-pun dia tidak mengerti, apalagi cara-cara memilih yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan KPU. Berebeda dengan Muh. Adriansyah, siswi tunanetra bernama Nurjannah ini sangat antusias dan semangat pada saat Tim PKM melakukan sosialisasi. Dia mendengarkan dengan seksama dan sangat senang saat diberikan Flyer dalam huruf Braile. Saat ditanya kendala yang dihadapi Nurjannah dan Walinya, tidak jauh berbeda dengan kendala siswa-siswi lainnya. Mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung ke rumah, apalagi mendapatkan brosur/flyer dalam huruf braile. Sehingga Nurjannah sering bertanya kepada orangtua dan kakaknya tentang bagaimana cara memilih, dan bagaimana cara mengetahui calon kandidat yang akan dipilih tersebut, karena keterbatasannya tidak bisa melihat.

Faiz Risky Ramadhan merupakan penyandang tunagrahita ringan, dimana dia memiliki kondisi kemampuan intelektual dibawah rata-rata orang normal pada umumnya, sehingga dia harus diberikan pendampingan khusus saat belajar dan melakukan kegiatan



lainnya. Pada saat tim PKM berkunjung dan menyampaikan Sosialisasi, Faiz dan Orang tuanya menyambut dengan baik. Tim PKM menjelaskan mengenai hak-hak bagi Penyandang Disabilitas khususnya Tunagrahita ringan, melalui Flyer yang telah dibuat khusus. Orangtua Faiz menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi terkait kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak Disabilitas seperti anaknya, bahwa mereka belum mengetahui sama sekali mengenai adanya Pendampingan khusus bagi anak Tuna Gragita Ringan dalam memilih pada saat pemilu berlangsung. Sebelum adanya sosialisasi langsung ini, orangtua Faiz awalnya tidak berniat mendaftarkan anaknya untuk menjadi Pemilih, karena menganggap keterbatasan anaknya akan menjadi penghambat pada saat pemilihan berlangsung. Namun setelah mendengarkan penjelasan dari Tim PKM, disertai dengan Flyer yang begitu jelas, orangtua Faiz berubah pikiran dan bersemangat untuk mengurus persyaratan anaknya agar dapat ikut serta dalam pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

Tunadaksa ringan merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik. Dedi Muliono merupakan anak dengan tunadaksa ringan, meskipun kondisi badannya tidak sempurna, namun Dedi masih bisa menyimak dan menerima penyampaian sosialisasi yang dilakukan secara perlahan, dengan menggunakan flyer yang ada. Sama seperti penyandang disabilitas lainnya, kendala yang dihadapi Dedi Muliono dan orangtuanya adalah minimnya pengetahuan dan informasi tentang pendidikan politik yang dilakukan secara langsung. Orantua Dedi Muliono mengakui bahwa mereka tidak pernah memberikan informasi-informasi terkait Pemilu, calon kandidat yang akan berpartisipasi dalam Pemilu, serta bagaimana pada saat memilih langsung di TPS. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan orangtua dari Dedi Muliono juga tergolong rendah, Bapak Dedi Muliono sehari-hari bekerja di Kebun dan Ibunya bekerja sebagai Penjual ikan di pasar.

Jumrin merupakan anak dengan Kebutuhan khusus Autis. Anak dengan Autis ini memiliki gangguan terhadap perkembangan otak yang memengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Saat melakukan

Sosialisasi Jumrin cukup tenang dan mendengarkan apa yang kami sampaikan. Sama halnya dengan penyandang disabilitas lainnya, Jumrin yang tinggal dengan kakaknya belum mengetahui mengenai adanya Hak-hak disabilitas (khususnya Autis) untuk menyampaikan Aspirasinya dalam pemilu yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

## 2. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pengabdian yang dilaksanakan secara *door to door* pada tanggal 18 dan 20 September 2021 kemudian dipresentasikan kepada pihak KPU Kota Kendari dalam bentuk kegiatan diseminasi pada tanggal 28 September 2021, bertempat di Kantor KPU Kota Kendari. Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, S.P., beberapa komisioner KPU Kota Kendari, dan staf serta perwakilan dari mitra pengabdian yakni Guru dari SLB B-F Mandara, perwakilan siswa disabilitas SLB B-F Mandara dengan didampingi wali. Kegiatan diseminasi ini juga dihadiri alumni dan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, FISIP UHO.

Kegiatan diseminasi dimulai dengan sambutan oleh Ketua KPU Kota Kendari dengan menyampaikan program-program yang telah dilakukan oleh KPU Kota Kendari terkait pemenuhan hak politik pemilih disabilitas, seperti bekerja sama dengan persatuan disabilitas Kota Kendari dan SLB-SLB yang berada di Kota Kendari. Kantor KPU Kota Kendari juga memiliki ruang simulasi khusus yang terbuka untuk para siswa yang ingin mengetahui tentang proses pemilihan umum.

Diseminasi dilanjutkan dengan pemaparan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh ketua tim pengabdian dengan menyampaikan tujuan kegiatan, menampilkan instrumen yang digunakan dalam sosialisasi baik flyer yang dicetak biasa maupun yang dicetak dalam huruf braile. Ketua tim juga memaparkan kendala yang dihadapi oleh siswa disabilitas yaitu tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung ke rumah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai apa itu pemilu dan bagaimana cara memilih / menyalurkan hak politiknya. Presentasi diakhiri dengan memberikan saran kepada KPU Kota Kendari agar membuat sebuah program khusus yang berkesinambungan bagi siswa-siswi penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan

SLB-SLB di Kota Kendari. Sehingga mereka bersedia dengan sukarela memberikan suaranya dalam pemilu tanpa harus malu dan takut berada di TPS.

Kegiatan diseminasi ini juga dilanjutkan dengan sesi hearing sekaligus tanya jawab dari mitra pengabdian. Adapun beberapa pertanyaannya ialah sebagai berikut:

1. Keamanan pemilih disabilitas saat menyampaikan hak politiknya di TPS, prosedur kesehatan saat pemilu berlangsung dan mengenai wajib pilih yang belum memiliki KTP (La Hudi, wali siswa)
2. Jaminan keselamatan untuk pemilih tunanetra serta apakah boleh disabilitas didampingi saat menyalurkan hak suaranya di TPS (Murni Safitri, wali siswa)
3. Penyediaan alih Bahasa untuk disabilitas tunarungu saat kampanye (Asnita, S.Pd., Guru SLB Mandara)
4. Saran untuk penyediaan kertas suara yang dilengkapi dengan huruf braile dan apakah boleh jika pemilih disabilitas khususnya tuna grahita dan autis untuk menyampaikan hak suaranya di rumah masing-masing atau dengan kata lain, pihak KPPS lah yang mengunjungi rumah pemilih disabilitas (La Ndoaji, S.Pd., Guru SLB Mandara)
5. Saran untuk menyediakan pendamping untuk disabilitas tunagrahita saat pemilu (Nunung Prawati, S.Pd., Guru SLB Mandara)

Atas beberapa pertanyaan dan saran tersebut, Ketua KPU Kota Kendari memprogramkan akan mendata jumlah siswa disabilitas wajib pilih di beberapa SMA-LB yang berada di Kota Kendari. Adapun untuk siswa yang belum memiliki KTP, tetap dapat menyalurkan hak pilihnya dengan melampirkan kartu keluarga. Sementara itu, pelayanan KPU sendiri tetap berpedoman pada standar proses yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mengenai pendamping untuk disabilitas tunagrahita, diperbolehkan saat pemilu berlangsung dan dilakukan di hadapan petugas KPPS.

KPU Kota Kendari melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) juga menyediakan media sosial untuk menyampaikan program-programnya kepada masyarakat disertai dengan produk legalitas KPU Kota Kendari. Hal ini dianggap efektif

terutama di masa pandemi covid-19, dimana mobilitas dibatasi termasuk kegiatan sosialisasi secara langsung dengan mengumpulkan peserta di satu tempat. KPU Kota Kendari juga akan menyediakan mobil yang akan melakukan *tour* keliling kota Kendari untuk mendatangi masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pilih.

Pihak KPU Kota Kendari sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi ini karena merupakan kali pertama KPU bertemu dengan pihak akademisi, guru dan siswa disabilitas di satu forum yang sama. KPU Kota Kendari juga menerima rekomendasi dari tim pengabdian yakni mempertimbangkan untuk mengadakan sosialisasi Pendidikan politik secara door to door untuk disabilitas di masa mendatang sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah suara disabilitas pada pemilu ke depannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Pendidikan Politik bagi Kelompok Disabilitas khususnya bagi Siswa-siswi SLB B-F Mandara Kota Kendari. Hal ini mengingat masih kurangnya jumlah partisipasi politik dari kawan disabilitas pada pemilu yang diselenggarakan sebelumnya di kota Kendari. Pentingnya pendidikan politik bagi siswa-siswi disabilitas ini, agar mereka menyadari bahwa suara mereka dibutuhkan dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Mengingat yang selama ini terjadi, para penyandang disabilitas belum mengetahui hak-hak politik mereka dengan baik disebabkan karena kondisi mereka yang terbatas. Dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung ke rumah-rumah siswa, keseluruhan siswa-siswi dan orangtuanya mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pengenalan tentang pendidikan politik kepada mereka, baik itu yang dilakukan secara langsung mendatangi rumah mereka ataupun di sekolah atau tempat publik lainnya.

#### **E. KESIMPULAN**

Alhamdulillah, puji syukur tim pengabdian panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang sehingga dapat menyelesaikan kegiatan berjudul **“Sosialisasi Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas di SLB B-F**

**Mandara Kota Kendari Tahun 2021**” sebagai salah satu bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Tridharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya kami menghaturkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian kegiatan ini, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Halu Oleo Kendari
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
4. Kepala Sekolah serta Guru SLB B-F Mandara Kota Kendari
5. Ketua KPU Kota Kendari beserta jajaran
6. Siswa-siswi SLB B-F Mandara Kota Kendari serta Orang tua/ wali
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mendukung dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak, selama kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan keterbatasan alih bahasa. Untuk itu, kami berharap adanya kegiatan serupa di masa mendatang agar dapat memperjuangkan hak politik kawan disabilitas bukan hanya di Kota Kendari, tetapi di seluruh penjuru Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- LPPM UHO. 2021. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Internal Universitas Halu Oleo Tahun 2021, Kendari.
- Meyer, T. 2002. Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan. Universitas Dortmund & Friedrich-Ebert Stiftung.